****

**SEKRETARIAT DPRD**

**KABUPATEN MAMUJU**

**TAHUN 2025**

**KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sang Maha Pencipta Semesta Alam, karena dengan rahmat dan hidayah Nya, Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) perubahan Tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan PD selama satu tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan Renstra-PD. Adapun penyusunan Renja-PD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai pada APBD di Tahun 2025. Dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berasaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Mamuju, 2025Sekretaris DPRD Kab. Mamuju**Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM**NIP. 19651231 199303 1 181 |

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB1 PENDAHULUAN 1

* 1. LatarBelakang 1
	2. Landasan Hukum 2
	3. Maksuddan Tujuan 3
	4. SistematikaPenulisan 3

BAB2 HASILEVALUASIRENJATAHUNLALU 4

* 1. EvaluasipelaksanaanRencanaKerjatahunlaludan capaianRenstra 4
	2. AnalisisKinerjaPelayanan 23
	3. Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugasdan Fungsi 24
	4. ReviewterhadapRancanganAwalRKPD 25
	5. PenelaahanUsulanProgramdan KegiatanMasyarakat 33

BAB3TUJUANDANSASARAN 34

* 1. TelaahanterhadapKebijakanNasional 34
	2. Tujuandan Sasaran 35
	3. Program dan Kegiatan 35

BAB4RENCANAKERJADANPENDANAAN 45

* 1. RencanaKerjadan Pendanaan 45
	2. PrioritasPerangkatDaerahyangmendukungPrioritas Kabupaten 45
	3. PrioritasPerangkatDaerah 45

BAB5PENUTUP 47

* 1. Kaidah-kaidahpelaksanaan 47
	2. Rencanatindaklanjut 47

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Renja adalah Dokumen Perencanaan OPD Untuk periode 1 tahun, yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan baik yang di laksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat Sekretariat DPRD sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu OPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju. Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap pengelola pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja OPD.

Rancangan Renja OPD dibahas pada forum OPD, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Berdasarkan peraturan perundangan diatas maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Mamuju dan Rencana Strategis (Renstra) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati sebagai tindak lanjut ditetapkannya RPJMD dan RKPD tersebut, untuk itu setiap satuan kerja perangkat daerah diharuskan menyusun Renja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan.

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah kabupaten Mamuju

Renja Sekretariat DPRD tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025.

Subtansi dan muatan Renja OPD, meliputi : (1). Program, kegiatan dan sub kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru, (2). Lokasi atau tempat dari setiap sub kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/Kelurahan atau kecamatan, (3). Indicator Kinerja yang terdiri dari kinerja Program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang akan dicapai dari program dan indicator kinerja Kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. (4). Kelompok Sasaran yang memuat penjelasan terhadap karateristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan kelompok masyarakat yang rentan termarginalkan (5). Pagu Indikatif dan Perkiraan Maju, memuat kebutuhan dana

untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat. Peran serta lembaga DPRD mempunyai arti penting mengingat lembaga legislatif di daerah mempunyai fungsi pengawasan, fungsi penyusunan Peraturan Daerah serta fungsi anggaran. Sekretariat DPRD memfasilitasi DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif untuk bersama-sama dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah berbasis potensi sumber daya daerah, aspirasi masyarakat serta kepentingan yang selaras dengan kebutuhan daerah.

* 1. **LANDASAN HUKUM**

Rencana Kerja (Renja) OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju disusun mengacu pada landasan hukum yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Propinsi Sulawesi Barat;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5673);
5. Peraturan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Tahun 2023;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan.
12. jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017 Tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 170/07/X/DPRD/2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2026.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;
19. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tambahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

* 1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan Good and clean governance. Disamping itu Renja ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya instrument Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju.
2. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja pembangunan.
3. Tersusunnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju.
	1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

 Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

 BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2025

 BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, yang memuat Evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

 BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program kegiatan dan sub Kegiatan Sekretariat DPRD yang terdiri dari : Telaahan terhadap kebijakan nasional, Telaahan terhadap kebijakan provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan Bab yang memuat Penutup yang terdiri dari Penjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB V Penutup Memuat kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

 Proses Penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD, dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksannaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evalusi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

 Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perubahan Sekretariat DPRD dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025.

 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk belanja pegawai, dan belanja langsung diperuntukkan untuk belanja OPD dan Belanja Publik dengan ruang lingkup kegiatannya *(tabel Matriks Evaluasi terlampir)*

Tabel 2.1.**Tabel. T.C 29**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Sampai dengan Tahun 2025

| NO. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022-2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Targte Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025  | Tingkat Ralisasi (%)  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=(7/6)** | **9** | **10=(5+7+9)** | **11=(10/4)** |
|   | **Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Urusan Perencanaan** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |  **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100%** | **100 %** | **100 %** | **I00%** |
| I | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Persentase dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD*** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | 100% | **100 %** | **100 %** | 100% |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dok Renstra dan Renja Pokok dan Perubahan yang disusun |  9 dok | 6 dok  | 3 dok  | 3 dok  | **1** | 2 dok  | 11 dok  | 1.2 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun | 3 dok  | 2 dok | 1 dok- | 1 dok  | **1** | 2 dok | 7 dok | 2.3 |
| 3 |  Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun | 3 dok |  2 dok |  1 dok |  1 dok | 1 |  2 dok |  5 dok | **1.6** |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun |  3 dok | 2 dok | 1 dok | 1 dok | 1 | 1 dok | 4 dok | **1.3** |
| 5 |  Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun |  3 dok |  2 dok |  1 dok |  1 dok | 1 |  1 dok |  4 dok | **1.3** |
| 6 |  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian indikator, RPJMD, Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja. |  3 lap  |  2 lap |  1 lap |  1 lap | **1** |  1 lap |  4 lap | **1.3** |
| 7 |  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan Perjanjian Kinerja |  3 lap | 2 lap | 1 lap | 1 lap | **1** | 1 lap | 4 lap | **1.3** |
| ***II*** |  ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Persentase dok/laporan adm. Keuangan*** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| 1 |  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan |  201 org  |  134 org  |  67 org |  67 org | **1** |  59 org  |  269 org  | 1.3 |
| **2** |  Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah laporan administrasi pelaksaaan tugas ASN | **3 dok** | **2 dok** | **1 dok** | **1 dok** | **1** | **1 dok** | **4 dok** | **1.3** |
| 3 |  Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi | **3 dok** | **2 dok** | **1 dok** | **1 dok** | **1** | **1 dok** | **4 dok** | **1.3** |
| 4 |  Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | jumlah dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 3 lap | 2 lap | 1 lap | 1 lap | **1** | 1 lap | 4 lap | **1.3** |
| 5 |  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | 3 dok | 2 dok | 1 dok | 1 dok | **1** | 1 dok | 4 dokt | **1.3** |
| **6** | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen yang memerlukan tanggapan pemeriksaan | **3 lap**  | **2 lap** | **1 lap** | **1 lap** | **1** | **1 lap** | **4 lap** | **1.3** |
| 7 |  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran | 54 lap | 36 lap | 18 lap | 18 lap | 1 | 1 dok | 55 dok | 1.0 |
| **8** | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran |  **3 dok**  | **2 dok** | **1 dok** | **1 dok** | **1** | **1 dok** | **4 dok** | **1.3** |
| III |  ***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*** | ***Persentase Laporan administrasi barang milik daerah OPD*** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun | 15 dok | 10 dok | 5 dok | 5 dok | **1** | 5 dok | 20 dok | 1.3 |
| 2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah laporan barang milik daerah yang diamankan | 3 dok | 2 dok | 1 dok | 1 dok | **1** | 5 dok | 8 dok | 2.6 |
| 3 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah laporan barang milik daerah yang akan dinilai | 3 lap | 2 lap | 1 lap | 1 lap | **1** | 1 lap | 4 lap | 1.3 |
| 4 |  Pembinaan,pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD | Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah yang disusun | 3 lap | 2 lap | 1 lap | 1 lap | **1** | 1 lap | 4 lap | 1.3 |
| 5 | Rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah yang disusun | 3 lap | 2 lap | 1 lap | 1 lap | 1 | 1 lap | 4 lap | 2.0 |
| 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Asset SKPD | 3 lap | 2 lap | 1 lap | 1 lap | **1** | 1 lap | 4 lap | 1.3 |
| 7 |  Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | jumlah laporan pemanfaatan BMD | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| IV |  ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian OPD*** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **1** |  Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Jenis sarana dan prasarana yang diadakan terkait kedisiplinan | **-**  |  **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia | **3 paket** | **2 paket** | **1 paket** | **1 paket** | **1** | **4 paket** | **7 paket** | **2.3** |
| **3** |  monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah laporan monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | **3 dok** | **2 dok** | **1 dok** | **1 dok** | **1** | **1 dok** | **4 dok** | **1.3** |
| **4** |  Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  | jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis per-UU | **84 org** | **56 org** | **28 org** | **28 dok** | **1** | **28 org** | **112 org** | **1.3** |
| **V** | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu*** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **1** | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah jenis komponen listrik yang tersedia | **3 paket** | **2 paket** | **1 paket** | **1 paket** | **1** | **12 paket** | **15 paket** | **5.0** |
| 2 |  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 36 paket | 24 paket | 12 paket | 12 paket | 1 | 54 paket | 90 paket | 2.5 |
| 3 |  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia | 3 paket | 2 paket | 1 paket | 1 paket | **1** | 6 paket | 9 paket | 3.0 |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis bahan logistik kantor | 6 paket | 4 paket | 2 paket | 2 paket | **1** | 2 paket | 8 paket | 1.3 |
| **5** | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan | **36 paket**  | **24 paket**  | **12 paket**  | **12 paket**  | **1** | **12 paket**  | **48 paket**  | **1.3** |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 dok | 2 dok  | 1 dok  | 1 dok  | **1** | 3 dok  | 6 dok  | 2.0 |
| **7** |  Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Jenis bahan material | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8 |  Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Kunjungan Tamu yang mendapatkan fasilitasi layanan |  33 lap | 22 lap | 11 lap | 11 lap |  **1** | 18333 lap | 18366 lap | 556.5 |
| 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan hasil rapat luar dan dalam daerah yang dikoordinasikan | 300 lap | 200 lap | 100 lap | 100 lap | **1** | 160 lap | 460 lap | 1.5 |
| 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen arsip yang dikelola | **-** | **-** | - | - | - | **-** | **-** | **-** |
| 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelolah | aplikasi | aplikasi | aplikasi | aplikasi | - | aplikasi | aplikasi | **-** |
| VI | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah*** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan | 6 unit | 4 unit | 2 unit | 2 unit | **1** | 2 unit | 8 unit | 1.3 |
| 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang diadakan | 3 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 | 3 unit | 5 unit | 1.6 |
| 3 |  Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan | 3 unit | 2 unit | 1 unit | 1 unit |  **1** | 1 unit | 4 unit | 1.3 |
| 4 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor diadakan | 6 unit | 4 unit | 2 unit | 2 unit | **1** | 8 unit | 14 unit | 2.3 |
| **5** | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Aset tetap lainnya yang diadakan |  **9 unit**  | **6 unit**  | **3 unit**  | **3 unit**  | **1** | **3 unit**  | **10 unit**  | **1.1** |
| 6 |  Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset tak berwujud lainnya yang diadakan | jenis | jenis | jenis | jenis | **-** | jenis | jenis | **-** |
| **7** |  Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor/bangunan lain yang diadakan | **unit** | **unit** | **unit** | **unit** | **-** | **unit** | **unit** | **-** |
| 8 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lain yang diadakan | jenis | jenis | jenis | jenis | - | jenis | jenis | **-** |
| 9 |  Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor / bangunan lain tersedia | jenis | jenis | jenis | jenis | - | jenis | jenis | **-** |
| **VII** |  ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Persentase Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran*** | **100 %** | **100%** | **100%** | **100%** | **-** | **100%** | **100%** |  **100%** |
| **1** | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat | **-** |  **-** |  **-** |  **-** | **-** | **-** |  **-** | **-** |
| **2** | Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | **9 lap** | **6 lap** | **3 lap** | **3 lap** | **1** | **3 lap** | **12 lap** | **1.3** |
| **3** | Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Jasa KebersihanJumlah Perlengkapan Kebersihan | **24 lap** | **16 lap** | **8 lap** | **8 lap** | **1** | **8 lap** | **32 lap** | **1.3** |
| **4** | Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | **60 lap** | **40 lap** | **20 lap** | **20 lap** | **1** | **20 lap** | **80 lap** | **1.3** |
| **VIII** | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Persentase barang milik daerah yang dipelihara*** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
|  |  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan roda 2 dan 4 yang dipelihara | **18 unit** | **12 unit** | **6 unit** | **6 unit** | **1** | **6 unit** | **24 unit** | **1.3** |
|  |  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan roda 2 dan 4 yang dipelihara | **78 unit** | **52 unit** | **26 unit** | **26 unit** | **1** | **26 unit** | **104 unit** | **1.3** |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah jasa pemeliharaandan perizinan alat berat yang dipelihara | **unit** | **unit** | **unit** | **unit** | **-** | **unit** | **unit** | **-** |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Jasa pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor | **unit** | **unit** | **unit** | **unit** | **-** | **unit** | **unit** | **-** |
|  | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang dipelihara | **unit** | **unit** | **unit** | **unit** | **-** | **unit** | **unit** | **-** |
|  |  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | **168 unit** | **112 unit** |  **56 unit** | **56 unit** | **1** | **56 unit** | **224 unit** | **1.3** |
|  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara | **jenis** |  **jenis** | **jenis** | **jenis** | **-** |  **jenis** |  **jenis** | **-** |
|  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara | **12 unit** | **8 unit** | **4 unit** |  **4 unit** | **1** | **4 unit** |  **16 unit** | **1.3** |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor / Bangunan Lainnya terpelihara | **12 unit** | **8 unit** | **4 unit** | **4 unit** | **1** | **4 unit** | **16 unit** | **1.3** |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang dipelihara | **9 unit** | **6 unit** |  **3 unit** |  **3 unit** | **1** | **3 unit** | **12 unit** | **1.3** |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang dipelihara | **9 jenis** | **6 jenis** |  **3 jenis** |  **3 jenis** | **1** | **3 jenis** | **12 jenis** | **1.3** |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Jumlah luas tanah yang direhab | **M2** | **M2** | **M2** | **M2** | **M2** | **M2** | **M2** | **M2** |
| **IX** |  ***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)*** | ***Hasil Penilaian DPRD terhadap layanan keuangan dan Kesejahteraan*** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **1** | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | **90 org** |  **60 org** |  **30 org** | **30 org** | **1** |  **30 org** |  **120 org** | **1.3** |
| **2** | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan | **9 paket** |  **6 paket** |  **3 paket** |  **3 paket** | **1** |  **3 paket** |  **12 paket** | **1.3** |
| **3** |  Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Laporan Medical Check Up DPRD | **kali** | **kali** | **kali** | **kali** | **-** | **kali** | **kali** | **-** |
| **X** | ***Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)*** | ***Hasil Penilaian DPRD terhadap layanan administrasi*** | **100%** |  **100%** |  **100%** |  **100%** |  **100%** |  **100%** |  **100%** |  **100%** |
| **1** | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD | Jumlah Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD yang diselenggarakan | **dok** |  **dok** |  **dok** |  **dok** | **-** |  **dok** |  **dok** | **-** |
| **2** |  Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Fraksi DPRD yang mendapatkan Fasilitasi | **18 praksi** | **12 praksi** | **6 praksi** | **6 praksi** | **1** | **6 praksi** |  **24 praksi** | **1.3** |
| **3** |  Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang terfasilitasi | **3 lap** | **2 lap** | **1 lap** |  **1 lap** | **1** | **1 lap** | **4 lap** | **1.3** |
| **4** | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Kantor DPRD dan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | **21 paket** |  **14 paket** |  **7 paket** |  **7 paket** | **1** |  **7 paket** |  **28 paket** | **1.3** |
| **II** | **PROGRAM DUKUGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Persentase capaian dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** | **100%** |  **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
|  | ***Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD***  | ***Persentase peraturan dibentuk*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah usulan Ranperda yang diterima siap dibahas | **84 dok** | **56 dok** | **28 dok** | **28 dok** | **1** | **28 dok** | **112 dok** | **1.3** |
| 2 | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah ranperda yang dibahas | 84 dok |   56 dok |   28 dok |   28 dok | 1  |   28 dok |   112 dok | 1.3 |
| 3 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah penyelanggaraan kajian perUU | 3 dok |   2 dok |   1 dok |   1 dok |  1 |   1 dok |   4 dok | 1.3 |
| 4 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah penjelasan/keterangan NA yang disusun | 84 dok |   56 dok |   28 dok |   28 dok | 1  |   28 dok |   112 dok | 1.3 |
| 5 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Tatib DPRD yang disusun | dok |   dok |   dok |   dok |  - |   dok |   dok | - |
| XI | ***Pembahasan Kebijakan Anggaran*** | ***Persentase laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran*** | 100% |   100% |   100% |   100% |   100% |   100% |   100% |  100% |
| 1 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS | 3 Dok |   2 dok |   1 dok |   1 dok | 1  |   1 dok |   4 dok | 1.3 |
| 2 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 6 Dok |   4 dok |   2 dok |   2 dok |  1 |   2 dok |   8 dok | 1.3 |
| **3** | Pembahasan APBD | Jumlah Laporan Pembahasan APBD | **3 dok** | **2 dok** | **1 dok** | **1 dok** | **1** | **1 dok** | **4 dok** | **1.3** |
| 4 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan | 3 dok | 2 dok | 1 dok | 1 dok |  1 | 1 dok | 4 dok | 1.3 |
| 5 | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Laporan Pembahasan Laporan Semester | 6 dok | 4 dok | 2 dok | 2 dok | 1  | 2 dok | 8 dok | 1.3 |
| 6 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 3 dok | 2 dok | 1 dok | 1 dok | 1  | 1 dok | 4 dok | 1.3 |
| XII |  ***Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*** | ***Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*** | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| **1** | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | **3 lap** | **2 lap** | **1 lap** | **1 lap** | **1** | **1 lap** | **4 lap** | **1.3** |
| 2 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 3 lap | 2 lap | 1 lap | 1 lap | 1  | 1 lap | 4 lap | 1.3 |
| **3** |  Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | **3 lap** | **2 lap** | **1 lap** | **1 lap** | **1** | **1 lap** | **4 lap** | **1.3** |
| 4 |  Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 3 dok | 2 dok | 1 dok | 1 dok |  1 | 1 dok | 4 dok | 1.3 |
| 5 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 3 dok | 2 dok | 1 dok | 1 dok |  1 | 1 dok | 4 dok | 1.3 |
| 6 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 3 dok | 2 dok | 1 dok | 1 dok |  1 | 1 dok | 4 dok | 1.3 |
| 7 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Anggaran | 3 dok | 2 dok | 1 dok | 1 dok | 1  | 1 dok | 4 dok | 1.3 |
| 8 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Laporan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 3 dok | 2 dok | 1 dok | 1 dok | 1  | 1 dok | 4 dok | 1.3 |
| XIII | ***Peningkatan Kapasitas DPRD*** | ***Persentase Peningkatan Kapasistas DPRD*** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1 | Orientasi DPRD | Jumlah dewan yang mengikuti oreantasi  | org |   org |   org |   org | -  |   org |   org |  -  |
| **2** | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah pelaksanaan pendalaman tugas DPRD dilakukan | **6 dok** | **4 dok** | **2 dok** | **2 dok** | **1** | **2 dok** | **8 dok** | **1.3** |
| 3 |  Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia | 30 org | 20 org | 10 org | 10 org | 1  | 10 org | 40 org | 1.3 |
| **4** | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | jumlah tenaga ahli yang tersedia | **18 org** | **12 org** | **6 org** | **6 org** | **1** | **6 org** | **24 org** | **1.3** |
| 5 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah laporan kehumasan yang terselenggara |  3 dok |  2 dok |  1 dok |  1 dok | 1 |  1 dok |  4 dok | 1.3 |
| 6 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah laporan program kerja DPRD yang disusun | 3 dok | 2 dok | 1 dok | 1 dok | 1  | 1 dok | 4 dok | 1.3 |
| 7 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi dewan |  36 dok |  24 dok |  12 dok |  12 dok |  1 |  12 dok |  48 dok | 1.3 |
| **X*I*V** | ***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*** | ***Persentase Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat*** | 100% |   100% |   100% |   100% |   100% |   100% |   100% | 100% |
| **1** |  Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah laporan kunjungan kerja dalam daerah | **1.620 lap** | **1080 lap** | **540 lap** | **540 lap** | **1** | **540 lap** | **2160 lap** | **1.3** |
| 2 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah laporan Pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun | 90 dok | 60 dok | 30 dok | 30 dok |  1 | 30 dok | 120 dok | 1.3 |
| 3 | Pelaksanaan Reses | Jumlah Pelaksanaan Reses | 9 dok | 6 dok | 3 dok | 3 dok | 1  | 3 dok | 12 dok | 1.3 |
| **XV** |  ***Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*** | ***Persentase Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD*** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |  **100%** | **100%** | **100%** |  **100%** |
| **1** | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Dokumen kode etik yang disusun | **3 dok** | **2 dok** | **1 dok** | **1 dok** | **1** | **1 dok** | **4 dok** | **1.3** |
| 2 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah laporan pengawasan kode etik yang disusun | 3 lap | 2 lap | 1 lap | 1 lap | 1  | 1 lap | 4 lap | 1.3 |
| XVI |  *Pembahasan Kerja Sama Daerah* | *Persentase laporan pembahasan kerjasama daerah* | 100% |   100% |   100% |   100% |  100% |   100% |   100% |  100% |
| 1 |  Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | jumlah laporan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | dok | dok | dok | dok | -  | dok | dok | - |
| 2 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah laporan bahan komunikasi dan publikasi yang disusun | dok | dok | dok | dok |  - | dok | dok | - |
| **XVII** | ***Fasilitasi Tugas DPRD*** | ***Persentase Fasilitasi Tugas DPRD*** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100% | 100% |
| **1** | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD | **387 dok** | **258 dok** | **129 dok** | **129 dok** | **1** | **129 dok** | **516 dok** | **1.3** |
| 2 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah laporan kinerja DPRD yang disusun | 3 lap | 2 lap | 1 lap | 1 lap |  1 | 1 lap | 4 lap | 1.3 |
| 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah pelaksanaan tugas Bamus yang terfasilitasi | 36 dok | 24 dok | 12 dok | 12 dok |  1 | 12 dok | 48 dok | 1.3 |
| **4** |  Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah laporan tugas pimpinan yang terfasilitasi | **3 dok** | **2 dok** | **1 dok** | **1 dok** | **1** | **1 dok** | **4 dok** | **1.3** |
| **5** |  Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus | Jumlah usulan Ranperda yang diterima siap dibahas | **6 dok** | **4 dok** | **2 dok** | **2 dok** | **1** | **2 dok** | **8 dok** | **1.3** |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | INDIKATOR | SPM/STANDAR NASIONAL | IKK | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | REALISASI CAPAIAN | PROYEKSI | CATATAN ANALISA |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD |  | Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Memuaskan | baik | Baik | Baik | Baik | Memuaskan |  |
| 2 | Hasil penilaian kualitas layanan setwan terhadap DPRD |  | program dukungan pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD | baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Memuaskan | baik | Baik | Baik | Baik | Memuaskan |  |
| 3 | Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD |  |  | baik | Baik | Baik | Baik | ada | Memuaskan | baik | Baik | Baik | Baik | Memuaskan |  |
| 4 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (PMD 86/2017) |  |  | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |  |
| 5 | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (PMD 86/2017) |  |  | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |  |
| 6 | Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (PMD 86/2017) |  |  | ada | ada | ada | ada |  | ada | ada | ada | ada | ada | ada |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Permasalahan penting terkait pelayanan tentang Program rangcangan kerja Sekretariat DPRD dan Dewan perwakilan rakyat daerah Dalam proses tugas dan wewenangx dalam membentuk peraturan daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah dan proses pelaporan hasil reses yang lambat atau tidak tepat waktu sehingga pengusulan pokok-pokok pikiran (aspirasi masyarakat) juga ikut terhambat.

2.4 tabel TC 3.1

|  |
| --- |
| TABEL T-C 31 |
| REVIEW TERHADAP PAGU PERUBAHAN TAHUN 2025SEKRETARIAT DPRD |
| KABUPATEN MAMUJU |
|  |  |  |  |  |  |  | (Pagu Perubahan 2025) |  |  |  | pagu indikatif |  |  |
| SEKRETARIAT DPRD |  |  |  |  |  |  | LEMBAR ….........DARI ….......... |  |  |  |  |  |  |
| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | CATATAN PENTING |
| PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI  | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI  | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **4 02 SEKRETARIAT DPRD** |  |  |  |  | 31.837.735.750 | **4 02 SEKRETARIAT DPRD** |  |  |  |  |  |  |
|  | **4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** |  | **Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100** | **%** |  **23,975,124,550**  | **4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** |  | **Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100** | **%** |  |  |
|  | ***4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** |  | ***Persentase dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD*** | ***100*** | ***%*** |  **47,305,300**  | ***4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** |  | ***Persentase dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD*** | ***100*** | ***%*** |  |  |
|  | 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Mamuju | Jumlah dok Renstra dan Renja Pokok dan Perubahan yang disusun | 3 | dokumen |  **18,819,400**  | 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Mamuju | Jumlah dok Renstra dan Renja Pokok dan Perubahan yang disusun | 3 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Mamuju | Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun | 1 | dokumen |  **5,038,300**  | 4 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Mamuju | Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Mamuju | Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun | 1 | dokumen |  **4,703,100**  | 4 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Mamuju | Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Mamuju | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun | 1 | dokumen |  **4,134,700**  | 4 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Mamuju | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Mamuju | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun | 1 | dokumen |  **3,960,200**  | 4 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | Mamuju | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Mamuju | Jumlah Dokumen Evaluasi CAPAIAN INDIKATOR RPJMD, RENSTRA, RENJA dan Perjanjian Kinerja. | 1 | laporan |  **6,208,100**  | 4 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Mamuju | Jumlah Dokumen Evaluasi CAPAIAN INDIKATOR RPJMD, RENSTRA, RENJA dan Perjanjian Kinerja. | 1 | laporan |  |  |
|  | 4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Mamuju | Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan Perjanjian Kinerja | 1 | laporan |  **4,441,500**  | 4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Mamuju | Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan Perjanjian Kinerja | 4 | dokumen |  |  |
|  | ***4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** |  | ***Persentase dok/laporan adm. Keuangan*** | ***100*** | ***%*** |  **4,536,080,101**  | ***4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** |  | ***Persentase dok/laporan adm. Keuangan*** | ***100*** | ***%*** |  |  |
|  | 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Mamuju | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan | 12 | bulan |  **4,365,251,201**  | 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Mamuju | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan | 12 | bulan |  |  |
|  | 4 02 01 2.02 02 Pelaksanaan penatausahaan pengujian perivikasi keuangan SKPD | Mamuju | Jumlah laporan administrasi pelaksaaan tugas ASN | 12 | dokumen |  **150,204,400**  | 4 02 01 2.02 02 Pelaksanaan penatausahaan pengujian perivikasi keuangan SKPD | Mamuju | 4 02 01 2.02 02 Pelaksanaan penatausahaan pengujian perivikasi keuangan SKPD | 12 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Mamuju | Jumlah laporan Pelaksanaan akutansi SKPD | 1 | dokumen |  | 4 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Mamuju | Jumlah laporan Pelaksanaan akutansi SKPD | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Mamuju | 4 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | laporan |  **7,335,000**  | 4 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Mamuju | jumlah dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 1 | laporan |  |  |
|  | 4 02 01 2.02 06 pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. | Mamuju | 4 02 01 2.02 06 pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. | 1 | laporan |  **6,518,500**  | 4 02 01 2.02 06 pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan | Mamuju | jumlah dokumen pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan | 1 | laporan |  |  |
|  | 4 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Mamuju |  jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanganbulanan/triwulan/semesteran SKPD | 1 | dokumen |  **6,771,000**  | 4 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Mamuju |  jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanganbulanan/triwulan/semesteran SKPD | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2.02 08 penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Mamuju | jumlah Dokumen penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | 18 | laporan | 0 | 4 02 01 2.02 08 penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Mamuju | jumlah Dokumen penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | 18 | laporan |  |  |
|  |  ***4 02 01 2 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*** | Mamuju | ***Persentase Laporan administrasi barang milik daerah OPD*** | 100 | ~~%~~ |  **18,772,700**  |  ***4 02 01 2 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*** | Mamuju | ***Persentase Laporan administrasi barang milik daerah OPD*** | 100 | ~~%~~ |  |  |
|  | 4 02 01 2 03 01 penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD | Mamuju | jumlah dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD | 1 | dokumen | 0 | 4 02 01 2 03 01 penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD |  | jumlah dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2 03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Mamuju | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran | 1 | dokumen | 120.000 | 4 02 01 2 03 04 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Mamuju | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2 03 04 pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD | Mamuju | jumlah Dokumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD | 1 | dokumen | 0 | 4 02 01 2 03 04 pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD | Mamuju | jumlah Dokumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2 03 05 rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD | Mamuju |  Jumlah dokumen rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD | 1 | dokumen | 0 | 4 02 01 2 03 05 rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD | Mamuju |  Jumlah dokumen rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2 03 06 penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | Mamuju | jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 1 | dokumen | 18.652.700 | 4 02 01 2 03 06 penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | Mamuju | jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 1 | dokumen |  |  |
|  |  ***4 02 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** |  | ***Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian OPD*** | ***100*** | ***%*** |  **5,048,700**  | ***Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian OPD*** |  | ***Persentase Laporan administrasi barang milik daerah OPD*** | ***100*** | ***%*** |  |  |
|  |  4 02 01 2.05 02 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Mamuju |  jumlah dokumen pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 1 | dokumen | 0 |  4 02 01 2.05 02 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Mamuju |  jumlah dokumen pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 1 | dokumen |  |  |
|  |  4 02 01 2.05 05 monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Mamuju | Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun | 1 | dokumen |  **2,723,200**  |  4 02 01 2.03 05 monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Mamuju | Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun | 1 | dokumen |  |  |
|  |  4 02 01 2.05 11 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  | Mamuju | jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis per-UU | 1 | dokumen | 0 | jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis per-UU | Mamuju | Jumlah laporan barang milik daerah yang diamankan | 1 | dokumen |  |  |
|  | ***4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | Mamuju | ***Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu*** | 100 | ~~%~~ |  **1,030,598,448**  | ***4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | Mamuju | ***Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu*** | 100 | % |  |  |
|  | 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Mamuju | jumlah jenis komponen listrik yang tersedia | 1 | dokumen |  **1,964,000**  | 4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Mamuju | jumlah jenis komponen listrik yang tersedia | 1 | dokumen |  **1,964,000**  |  |
|  |  4 02 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Mamuju | Jumlah dokumen Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 1 | dokumen |  **1,961,000**  |  4 02 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Mamuju | Jumlah dokumen Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2.06 03 penyediaan peralatan rumah tangga | Mamuju | jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga | 12 | paket |   | 4 02 01 2.06 03 penyediaan peralatan rumah tangga | Mamuju | jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga | 12 | paket |  |  |
|  | 4 02 01 2.06 04 penyediaan bahan logistik kantor | Mamuju | jumlah dokumen penyediaan bahan logistik kantor | 1 | dokumen |  **65,228,148**  | 4 02 01 2.06 04 penyediaan bahan logistik kantor | Mamuju | jumlah dokumen penyediaan bahan logistik kantor | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2.06 05 penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | Mamuju | Jumlah Kunjungan Tamu yang mendapatkan fasilitasi layanan | ***11*** | ***laporan*** |   **674,349,800**  | 4 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Mamuju | Jumlah Kunjungan Tamu yang mendapatkan fasilitasi layanan | ***11*** | ***laporan*** |  |  |
|  | 4 02 01 2.06 06 penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | Mamuju | Jumlah laporan hasil rapat luar dan dalam daerah yang dikoordinasikan | 100 | ***laporan*** | 0 | 4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Mamuju | Jumlah laporan hasil rapat luar dan dalam daerah yang dikoordinasikan | 100 | ***laporan*** |  |  |
|  | 4 02 01 2.06 08 Fasilitas kunjungan tamu | Mamuju | jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu | 18 | ***laporan*** |  **245,032,000**  | 4 02 01 2.06 08 Fasilitas kunjungan tamu | Mamuju | jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu | 18 | ***laporan*** |  |  |
|  | 4 02 01 2.06 09 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Mamuju | jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 | ***laporan*** |  **42,063,500**  | 4 02 01 2.06 09 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Mamuju | jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 | ***laporan*** |  |  |
|  | ***4 02 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | Mamuju | ***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah*** | 100 | % |  **188,232,000**  | ***4 02 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | Mamuju | ***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah*** | 100 | % |  |  |
|  | 4 02 01 2.07 02 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Mamuju | jumlah dokumen Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 1 | dokumen |  | 4 02 01 2.07 02 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Mamuju | jumlah dokumen Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2.07 05 pengadaan mebel | Mamuju | jumlah dokumen pengadaan mebel | 1 | dokumen |  **143,232,000**  | 4 02 01 2.07 05 pengadaan mebel | Mamuju | jumlah dokumen pengadaan mebel | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Mamuju | jumlah dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2 | unit |  **45,000,000**  | 4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Mamuju | jumlah dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2 | unit |  |  |
|  | 4 02 01 2.07 11 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Mamuju | jumlah dokumen Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | 2 | unit | 0 | 4 02 01 2.07 11 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Mamuju | Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor diadakan | 2 | unit |  |  |
|  |  ***4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | Mamuju | ***Persentase Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran*** | 100 | % |  **637,502,437**  |  ***4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | Mamuju | ***Persentase Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran*** | 100 | % |  |  |
|  |  4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Mamuju | jumlah laporan penyediaan jasa surat manyurat | 12 | laporan |  |  4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Mamuju | jumlah laporan penyediaan jasa surat manyurat | 12 | laporan |  |  |
|  |  4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Mamuju | Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 | laporan |  **443,475,737**  |  4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Mamuju | Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 | laporan |  |  |
|  | 4 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Mamuju | Jumlah Jasa KebersihanJumlah Perlengkapan Kebersihan | 8 | laporan |  **103,538,700**  | 4 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Mamuju | Jumlah Jasa KebersihanJumlah Perlengkapan Kebersihan | 8 | laporan |  |  |
|  | 4 02 01 2.08 0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Mamuju | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | laporan |  **90,488,000**  | 4 02 01 2.08 0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Mamuju | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | laporan |  |  |
|  | ***4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | Mamuju | ***Persentase barang milik daerah yang dipelihara*** | 100 | % |  **862,226,050**  | ***4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | Mamuju | ***Persentase barang milik daerah yang dipelihara*** | 100 | % |  |  |
|  |  4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Mamuju | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan roda 2 dan 4 yang dipelihara | 5 | unit |  **142,950,050**  |  4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Mamuju | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan roda 2 dan 4 yang dipelihara | 5 | unit |  |  |
|  |  4 02 01 2.09 0002Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Mamuju | Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan roda 2 dan 4 yang dipelihara | 25 | unit |  **16,600,000**  |  4 02 01 2.09 0002Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Mamuju | Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan roda 2 dan 4 yang dipelihara | 25 | unit |  |  |
|  |  4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 13 | unit |   **26,448,000**   |  4 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 13 | unit |  |  |
|  | 4 02 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Mamuju | Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara | 1 | unit |  **6,000,000**  | 4 02 01 2.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Mamuju | Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara | 1 | unit |  |  |
|  | 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Mamuju | Jumlah Gedung Kantor / Bangunan Lainnya terpelihara | 1 | unit |  **670,228,000**  | 4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Mamuju | Jumlah Gedung Kantor / Bangunan Lainnya terpelihara | 1 | unit |  |  |
|  | 4 02 01 2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Mamuju | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang dipelihara | 1 | unit | 0 | 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Mamuju | Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia | 1 | unit |  |  |
|  | 4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Mamuju | jumlah sarana Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | unit | **0**   | 4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Mamuju | jumlah sarana Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | unit |  |  |
|  |  ***4 02 02 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)*** | Mamuju | ***Hasil Penilaian DPRD terhadap layanan keuangan dan Kesejahteraan*** | 100 | % | **14,306,875,774**  |  ***4 02 02 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)*** | Mamuju | ***Hasil Penilaian DPRD terhadap layanan keuangan dan Kesejahteraan*** | 100 | % |  |  |
|  | 4 02 02 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Mamuju | Jumlah layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 30 | org |  **14,023,030,774**  | 4 02 02 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Mamuju | Jumlah layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 30 | org |  |  |
|  | 4 02 02 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Mamuju | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan | 1 | paket |  **283,845,000**  | 4 02 02 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Mamuju | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan | 1 | paket |  |  |
|  | ***4 02 02 2.16 Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)*** | Mamuju | ***Hasil Penilaian DPRD terhadap layanan administrasi*** | 100 | % |  **2,342,483,040**  | ***4 02 02 2.16 Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)*** | Mamuju | ***Hasil Penilaian DPRD terhadap layanan administrasi*** | 100 | % |  |  |
|  |  4 02 02 2.16 0002 Fasilitasi Fraksi DPRD | Mamuju | Jumlah Fraksi DPRD yang mendapatkan Fasilitasi | 18333 | laporan | 0 |  4 02 02 2.16 0002 Fasilitasi Fraksi DPRD | Mamuju | Jumlah Fraksi DPRD yang mendapatkan Fasilitasi | 18333 | laporan |  |  |
|  |  4 02 02 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Mamuju | jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang terfasilitasi | 6 | laporan |  **200,704,000**  |  4 02 02 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Mamuju | jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang terfasilitasi | 6 | laporan |  |  |
|  | 4 02 02 2.16 0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Mamuju | Jumlah jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Kantor DPRD dan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | 12 | laporan |  **2,141,779,040**  | 4 02 02 2.16 0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Mamuju | Jumlah jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Kantor DPRD dan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | 12 | laporan |  |  |
|  |  **4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | Mamuju | **Persentase capaian dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** | ***100*** | ***%*** |  **7,862,611,200**  |  **4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | Mamuju | **Persentase capaian dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** | ***100*** | ***%*** |  |  |
|  |  ***4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*** |  | ***Persentase peraturan dibentuk*** | ***100*** | ***%*** |  **7,410,400**  |  ***4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*** | Mamuju | ***Persentase peraturan dibentuk*** | ***100*** | ***%*** |  |  |
|  | 4 02 02 2.01 01 penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah  |  | jumlah penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah  | 1 | dokumen |  **4,021,400**  | 4 02 02 2.01 01 penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah  | Mamuju | jumlah penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah  | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Perda | Mamuju | Jumlah ranperda yang dibahas | 28 | laporan |  **3,389,000**  | 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Perda | Mamuju | Jumlah ranperda yang dibahas | 28 | laporan |  |  |
|  | 4 02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Mamuju | Jumlah penyelanggaraan kajian perUU | 1 | dokumen | 0 | 4 02 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Mamuju | Jumlah penyelanggaraan kajian perUU | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 02 2.01 04 fasilitas penyusunan penjelasan / keterangan naska akademik  | Mamuju | jumlah fasilitas penyusunan penjelasan / keterangan naska akademik  | 1 | dokumen | 0 | 4 02 02 2.01 04 fasilitas penyusunan penjelasan / keterangan naska akademik  | Mamuju | jumlah fasilitas penyusunan penjelasan / keterangan naska akademik  | 1 | dokumen |  |  |
|  | ***4 02 02 4 Pembahasan Kebijakan Anggaran*** | Mamuju | ***Persentase laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran*** | 100 | % |  **5,952,000**  | ***4 02 02 4 Pembahasan Kebijakan Anggaran*** | Mamuju | ***Persentase laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran*** | 100 | % |  |  |
|  | 4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS | Mamuju | Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS | 1 | dokumen |  **1,568,500**  | 4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS | Mamuju | Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Mamuju | Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 2 | dokumen |  **1,034,000**  | 4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Mamuju | Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 2 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD  | Mamuju | Jumlah Laporan Pembahasan APBD | 1 | dokumen |  **634,000**  | 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD  | Mamuju | Jumlah Laporan Pembahasan APBD | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan | Mamuju | Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan | 1 | dokumen |   **1,323,500**  | 4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan | Mamuju | Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Mamuju | Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 | dokumen |  **1,392,000**  | 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Mamuju | Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 | dokumen |  |  |
|  |  ***4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*** | **Mamuju** | ***Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*** | ***100*** | ***%*** |  **1,687,400**  |  ***4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*** | Mamuju | ***Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*** | ***100*** | ***%*** |  |  |
|  | 4 02 02 2.02 0006 pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah | Mamuju | jumlah pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah | 1 | dokumen |  **1,687,400**  | 4 02 02 2.02 0006 pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah | Mamuju | jumlah pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah | 1 | dokumen |  |  |
|  | ***4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD*** | Mamuju | ***Persentase Peningkatan Kapasistas DPRD*** | ***100*** | ***%*** |  **2,957,165,000**  | ***4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD*** | Mamuju | ***Persentase Peningkatan Kapasistas DPRD*** | ***100*** | ***%*** |  |  |
|  | 4 02 02 2.04.01 Oriantasi DPRD | Mamuju | jumlah Oriantasi DPRD | 1 | dokumen |  | 4 02 02 2.04 0002 Oriantasi DPRD | Mamuju | jumlah Oriantasi DPRD | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD | Mamuju | Jumlah pelaksanaan pendalaman tugas DPRD dilakukan | 2 | dokumen |  **1,056,504,800**  | 4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD | Mamuju | Jumlah pelaksanaan pendalaman tugas DPRD dilakukan | 2 | dokumen |  |  |
|  |  4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Mamuju | Jumlah Kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia | 10 | orang |  **270,000,000**  | 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Mamuju | Jumlah Jasa KebersihanJumlah Perlengkapan Kebersihan | 10 | orang |  |  |
|  | 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Mamuju | jumlah tenaga ahli yang tersedia | 6 | orang |  **144,000,000**  | 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Mamuju | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6 | orang |  |  |
|  | 4 02 02 2.04 06 Penyelenggaraan hubungan masyarakat (KUNDAPIL) | Mamuju | jumlah laporan Penyelenggaraan hubungan masyarakat (KUNDAPIL) | 1 | laporan  |  **1,104,066,000**  | 4 02 02 2.04 06 Penyelenggaraan hubungan masyarakat (KUNDAPIL) | Mamuju | jumlah laporan Penyelenggaraan hubungan masyarakat (KUNDAPIL) | 1 | laporan  |  |  |
|  | 4 02 02 2.04 07 penyusunan program kerja | Mamuju | jumlah penyusunan program kerja | 1 | dokumen |  **228,000**  | 4 02 02 2.04 07 penyusunan program kerja |  | jumlah penyusunan program kerja | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Mamuju | Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi dewan | 12 | dokumen |  **382,366,200**  | 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Mamuju | Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 | dokumen |  |  |
|  | ***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*** |  | ***Persentase Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat*** | ***100*** | ***%*** |   **3,734,170,300**  | ***4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** |  | ***Persentase barang milik daerah yang dipelihara*** | ***100*** | ***%*** |  |  |
|  |  4 02 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah | Mamuju | Jumlah laporan kunjungan kerja dalam daerah | 540 | 0rg |   **90,856,100**  |  4 02 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah | Mamuju | Jumlah laporan kunjungan kerja dalam daerah | 540 | 0rg |  |  |
|  | 4 02 02 2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Mamuju | Jumlah laporan Pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun | 30 | dokumen |   **960,200**  | 4 02 02 2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Mamuju | Jumlah laporan Pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun | 30 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses | Mamuju | Jumlah Pelaksanaan Reses | 3 | dokumen |  **3,642,354,000**   | 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses | Mamuju | Jumlah Pelaksanaan Reses | 3 | dokumen |  |  |
|  | ***4.02.02.2.06 pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD*** | Mamuju | ***persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD*** | ***100*** | ***%*** |  **3,112,000**  | ***4.02.02.2.06 pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD*** | Mamuju | ***persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD*** | ***100*** | ***%*** |  |  |
|  | 4 02 02 2.06 01 penyusunan kode etik DPRD | Mamuju | jumlah penyusunan kode etik DPRD | 1 | dokumen |  **3,112,000**  | 4 02 02 2.06 01 penyusunan kode etik DPRD | Mamuju | jumlah penyusunan kode etik DPRD | 1 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 02 2.06 02 pengawasan kode etik DPRD | Mamuju | jumlah pengawasan kode etik DPRD | 1 | dokumen | 0  | 4 02 02 2.06 02 pengawasan kode etik DPRD | Mamuju | jumlah pengawasan kode etik DPRD | 1 | dokumen |  |  |
|  | ***4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD*** | Mamuju | ***Persentase Fasilitasi Tugas DPRD*** | 100 | % |  **1,153,114,100**  | ***4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD*** | Mamuju | ***Persentase Fasilitasi Tugas DPRD*** | 100 | % |  |  |
|  | 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Mamuju | Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD | 128 | dokumen |  **1,151,419,100**  | 4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Mamuju | Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD | 128 | dokumen |  |  |
|  | 4 02 02 2.08 02 penyusunan laporan kinerja DPRD | Mamuju | jumlah penyusunan laporan kinerja DPRD | 1 | dokumen |  **731,400**  | 4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Mamuju | Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD | 1 | dokumen |  |  |
|  |  4 02 02 2.08 03 fasilitas pelaksanaan tugas badan musyawarah | Mamuju |  jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 1 | dokumen |  **963,600**  |  4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Mamuju |  jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 1 | dokumen |  |  |
|  |  4 02 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Mamuju | Jumlah laporan tugas pimpinan yang terfasilitasi | 1 | dokumen | 0 |  4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Mamuju | Jumlah laporan tugas pimpinan yang terfasilitasi | 1 | dokumen |  |  |
|  |  4 02 02 2.08 05 fasilitas pelaksanaan tugas panitia khusus | Mamuju | jumlah fasilitas pelaksanaan tugas panitia khusus | 1 | dokumen | 0 |  4 02 02 2.08 05 fasilitas pelaksanaan tugas panitia khusus | Mamuju | jumlah fasilitas pelaksanaan tugas panitia khusus | 1 | dokumen |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Merupakan rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun ini disusun dengan tetap berpedoman pada dokumen RPJMD, Renstra, dan RKPD Kabupaten Mamuju, namun tetap memperhatikan usulan program dari berbagai pihak baik dari usulan masyarakat (Musrenbang) maupun dari pemangku kepentingan, LSM bila ada.



**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Renstra-KL dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masingdalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Program dalam RPJMN ini kemudian dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja-OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Barat merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi Sulbar dalam menyusun dan menyesuaikan rencana pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Program dalam RPJMD ini kemudian dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Arah kebijakan pembangunan provinsi Sulawesi Barat sebagaimana termuat dalam RPJMD tahun 2021-2026, meliputi : Tata kelola pemerintahan dan profesionalisme aparatur, pengentasan kemiskinan, sarana dan prasarana ekonomi vital daerah, meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan berkualitas, kualitas dan derajat kesehatan, sarana dan prasarana ekonomi vital daerah dan Pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Program kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat serta pencapaian target dan sasaran Agenda Prioritas Pembangunan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat. Usulan program kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas SKPD, maupun lintas Kabupaten. Dalam hal ini diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Provinsi ke dalam satu tujuan yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

* 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasioanal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Sebagai Berikut :

1. **Tema Pembangunan**

Peningkatan Produktivitas untuk Trasnformasi Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan

1. **Prioritas Nasional**
* **Prioritas Nasional 5 :**

 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar hal ini dikarenakan dalam fungsi sebagai anggota DPRD

* **Prioritas Nasional 7 :**

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Memperhatikan arah kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2025, Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tahun 2025 tidak mendukung secara langsung prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2025 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rencangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD**

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Rencana Kerja 2024, adalah Sebagai Berikut :

1. **Tujuan :**

TERWUJUDNYA HUBUNGAN HARMONIS ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF SERTA PENINGKATAN PELAYANAN SETWAN BAGI KINERJA DPRD.

1. **Sasaran :**

Meningkatnya pelayanan bagi peningkatan kinerja DPRD Kab. Mamuju.

**3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

|  |
| --- |
|  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, dan dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan keputusan mentri dalam negeri no 050-5889 Tahun 2021 Tentang Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah; yang menjadi acuan terdapat uraian Program, Kegiatan dan sub kegiatan, dengan uraian untuk Sekretariat DPRD sebagai berikut : |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** |
| 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 |
| * Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 |
| * Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 |
| * Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 |
| * Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 |
| * Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 |
| * Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 |
| * Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 |
| 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 |
| * Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 |
| * Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 |
| * Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 |
| * Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 |
| * Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 |
| * Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 |
| * Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 |
| * Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 |
| 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 |
| * Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 |
| * Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 |
| * Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 |
| * Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 |
| * Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BarangMilik Daerah pada SKPD
 |
| * Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 |
| * Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 |
| 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 |
| * Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 |
| * Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya
 |
| * Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian
 |
| 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 |
| * Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai
 |
| * Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 |
| * Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
 |
| * Pemindahan Tugas ASN
 |
| * Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi
 |
| * Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 |
| * Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 |
| 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 |
| * Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 |
| * Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 |
| * Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 |
| * Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 |
| * Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 |
| * Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 |
| * Penyediaan Bahan/Material
 |
| * Fasilitasi Kunjungan Tamu
 |
| * Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 |
| * Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 |
| * Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 |
| 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 |
| * Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 |
| * Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 |
| * Pengadaan Alat Besar
 |
| * Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 |
| * Pengadaan Mebel
 |
| * Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 |
| * Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 |
| * Pengadaan Aset Tak Berwujud
 |
| * Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 |
| * Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 |
| * Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 |
| 1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 |
| * Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 |
| * Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 |
| * Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 |
| * Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 |
| * Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 |
| * Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 |
| 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 |
| * Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 |
| * Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 |
| * Pemeliharaan Mebel
 |
| * Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 |
| * Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 |
| * Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 |
| * Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 |
| * Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 |
| * Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 |
| * Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
 |
| 1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 |
|  |
| * Fasilitasi Keprotokolan
 |
| * Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 |
| * Pendokumentasian Tugas Pimpinan
 |
| 1. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 |
| (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan olehSekretariat DPRD) |
| * Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 |
| * Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 |
| * Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
 |
| 1. Layanan Administrasi DPRD
 |
| (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD) |
| * Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD
 |
| * Fasilitasi Fraksi DPRD
 |
| * Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 |
| * Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
 |
| **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** |
| 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 |
| * Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 |
| * Pembahasan Rancangan Perda
 |
| * Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 |
| * Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
 |
| * Penyusunan Tata Tertib DPRD
 |
| 1. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 |
| * Pembahasan KUA dan PPAS
 |
| * Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 |
| * Pembahasan APBD
 |
| * Pembahasan APBD Perubahan
 |
| * Pembahasan Laporan Semester
 |
| * Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 |
| 1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 |
| * Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 |
| * Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 |
| * Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 |
| * Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 |
| * Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 |
| * Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 |
| * Pengawasan Penggunaan Anggaran
 |
| * Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 |
| 1. Peningkatan Kapasitas DPRD
 |
| * Orientasi DPRD
 |
| * Pendalaman Tugas DPRD
 |
| * Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 |
| 1. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 |
| * Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 |
| * Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 |
| * Penyusunan Program Kerja DPRD
 |
| 1. Penyerapan dan Penghimpunan AspirasiMasyarakat
 |
| * Kunjungan Kerja dalam Daerah
 |
| * Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 |
| * Pelaksanaan Reses
 |
| 1. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 |
| * Penyusunan Kode Etik DPRD
 |
| * Pengawasan Kode Etik DPRD
 |
| 1. Pembahasan Kerja Sama Daerah
 |
| * Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi PersetujuanKerjasama Daerah
 |
| * Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
 |
| 1. Fasilitasi Tugas DPRD
 |
| * Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 |
| * Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 |
| * Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 |
| * Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 |

3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Mamuju TC. 33

**SEKRETARIAT DPRD KAB. MAMUJU**

| **Kode** | **Program / Kegiatan / Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)** |  **APBD Perubahan Tahun 2025** | **Catatan Penting**  | **Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lokasi**  | **Target Capaian Kinerja**  |  **Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**  |  **Sumber Dana**  | **Target Capaian Kinerja**  | **Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** |
|  |  |  |  |  |  |  | **100 Persen** |  **31,837,735,750**  |  |  | **100 Persen** | **28.769.141.573** |
| **4** | **02** | **01** |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kualitas Penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Mamuju** | **100 Persen** |  **23,975,124,550**  |  |  | **100 Persen** | **22,506,627,773** |
| **4** | **02** | **01** | **2,01** |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | **Mamuju** | **100 Persen** |  **47,305,300**  |  |  | **100 Persen** | 32,121,000 |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Mamuju | 1 dok |  **18,819,400**  | PAD |   | 1 dok | 15,841,500 |
| **4** | **02** | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA OPD  | Mamuju | 1 dok | 5.038.300 | DBH |   | 1 dok | 3,000,100  |
| **4** | **02** | 01 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA Perubahan OPD | Mamuju | 1 dok | 4.703.100 | DBH |   | 1 dok | 3,000,300 |
| **4** | **02** | 01 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA OPD  | Mamuju | 1 dok | 4.134.700 | DBH |   | 1 dok | 2,999,800  |
| **4** | **02** | 01 | 2,01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA OPD  | Mamuju | 1 dok | 3.960.200 | DBH |   | 1 dok | 2,998,100  |
| **4** | **02** | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD  | Mamuju | 4 lap | 6.208.100 | PAD |   | 4 lap | 3,082,700 |
| **4** | **02** | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah OPD  | Mamuju | 4 lap | 4.441.500 | PAD |   | 4 lap | 6,839,700 |
| **4** | **02** | **01** | **2,02** |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | ***Persentase dok/laporan adm. Keuangan*** | **Mamuju** | **100 Persen** |  **4,536,080,101**  |  |  | **100 Persen** | **4,473,456,503** |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan | Mamuju | 59 Orang/bulan |  **4,365,251,201**  |  DAU  |   | 59 Orang/bulan | 4,319,561,003 |
| **4** | **02** | 01 | 2,02 |  | Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah laporan administrasi pelaksaaan tugas ASN | Mamuju | 1 Dokuem |  | DBH |   | 1 Dokuem |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/perivikasi keuangan SKPD | Jumlah laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi | Mamuju | 1Dokumen  | 150.204.400 | PAD |   | 1Dokumen  | 141,894,500 |
| **4** | **02** | 01 | 2,02 | 04 | Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD  | jumlah dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Mamuju | 1 Dokumen  | - | PAD |   | 1 Dokumen  |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | Mamuju | 1 lap | 7.335.000 | PAD |   | 1 lap | 6,000,400  |
| **4** | **02** | 01 | 2,02 | 06 | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan  | Jumlah dokumen yang memerlukan tanggapan pemeriksaan | Mamuju | 1 Dokumen  |  **6,518,500**  | PAD |   | 1 Dokumen  | 3,000,400 |
| **4** | **02** | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran | Mamuju | 1 Dokumen  | 6.771.000 | PAD |   | 1 Dokumen  | 3,000,200 |
| **4** | **02** | 01 | 2,02 | 08 | Penyesunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran | Mamuju | 1 Dokumen  | - | PAD |   | 1 Dokumen  |  |
| **4** | **02** | **01** | **2,03** |  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Presentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Mamuju** | **100 Persen** | 18.772.700 |  |  | **100 Persen** | **2,402,500** |
| **4** | **02** | 01 | 2,03 | 01 | Penyususnan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD | Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun | Mamuju | 5 Dok |  | PAD |  | 5 Dok |  402,500 |
| **4** | **02** | 01 | 2,03 |  | Pengamanan barang milik Daerah SKPD | Jumlah laporan barang milik daerah yang diamankan | Mamuju | 5 dok | 120.000 |  |  | 5 dok |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,03 | 03 | Koordinasi barang milik daerah SKPD | Jumlah laporan barang milik daerah yang akan dinilai | Mamuju | 1 lap |  | PAD |  | 1 lap |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,03 | 04 | Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah SKPD | Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah yang disusun | Mamuju | 1 lap | - | PAD |  | 1 lap |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,03 | **05** | Rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah yang disusun | Mamuju | 1 lap | - | PAD |  | 1 lap |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,03 | 06 | Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Asset SKPD | Mamuju | 1 lap | 18.652.700 | PAD |  | 1 lap | 2,000,000 |
| **4** | **02** | 01 | 2,03 |  | Pemamfaatan barang milik daerah SKPD | jumlah laporan pemanfaatan BMD | Mamuju | **dok** |  | PAD |  | **dok** |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,05 |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | ***Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian OPD*** | Mamuju | 100 persen | 5.048.700 |  |   | 100 persen | **76.192.200** |
| **4** | **02** | 01 | 2,05 |   | Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | Jumlah Jenis sarana dan prasarana yang diadakan terkait kedisiplinan | Mamuju | jenis |  | PAD |   | jenis |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya  | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia | Mamuju | 4 Paket |  | PAD |   | 4 Paket | 19,000,000 |
| **4** | **02** | 01 | 2,05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah laporan monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Mamuju | 1 dok | 5.048.700 | PAD |   | 1 dok |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,06 | 11 | Bimbingan tehnis implementasi peraturan perundang-undangan | jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis per-UU | Mamuju | 28 org | - | PAD |   | 28 org | 53,355,000 |
| **4** | **02** | 01 | 2,06 |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | ***Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu*** | Mamuju | 100 persen |  **1,030,598,448**  |  |   | 100 persen | **509,304,225**  |
| **4** | **02** | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jumlah jenis komponen listrik yang tersedia | Mamuju | 12 paket |  **1,964,000**  |  DAU DBH |   | 12 paket | 4,949,025 |
| **4** | **02** | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan dan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Mamuju | 54 paket | 1.961.000 | DBH |   | 54 paket | 4,075,200 |
| **4** | **02** | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan peralatan rumah tangga  | Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia | Mamuju | 6 paket | - | DBH |   | 6 paket |  |
| **4** | **02** | **01** | 2,06 | **04** | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah jenis bahan logistik kantor | Mamuju | 2 paket | 65.228.148 | DBH |   | 2 paket | 18,780,000 |
| **4** | **02** | **01** | 2,06 | **05** | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan | Mamuju | 13 paket | 674.349.800 | DBH |  | paket | 8,000,000 |
| **4** | **02** | **01** | 2,06 | **06** | Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan  | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Mamuju | 3 dok |  | DBH |  | 3 dok |  |
| **4** | **02** | **01** | 2,06 |  | Penyediaan bahan/material  | Jumlah Jenis bahan material | Mamuju | jenis |  |  |  | jenis |  |
| **4** | **02** | **01** | 2,06 | **08** | Fasilitas kunjungan tamu | Jumlah Kunjungan Tamu yang mendapatkan fasilitasi layanan | Mamuju | 18333 lap |  **245,032,000**  | PAD |  | 18333 lap |  308,990,000 |
| **4** | **02** | **01** | **2,07** | **09** | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah laporan hasil rapat luar dan dalam daerah yang dikoordinasikan | Mamuju | 160 lap | 42.063.500 | PAD |  | 160 lap | 164,510,000 |
| **4** | **02** | **01** | **2,07** |  | Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen arsip yang dikelola | Mamuju | dok |  |  |  | dok |  |
| **4** | **02** | **01** | **2,06** |  | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis eletronik pada SKPD | Jumlah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelolah | Mamuju | aplikasi |  |  |  | aplikasi |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,07 |  | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**  | ***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah*** | **Mamuju** | **100 Persen** |  **188,232,000**  | PAD |   | **100 Persen** | **50,133,200** |
| **4** | **02** | **01** | **2,07** | **01** | Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan  | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan | **Mamuju** | **2 unit** |  | **PAD** |  | **2 unit** |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,07 |  | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang diadakan | **Mamuju** | unit |  |  |   | unit | 21,733,200 |
| **4** | **02** | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan mebel | Jumlah Mebel yang diadakan | **Mamuju** | 1 unit |  **143,232,000**  | PAD |  | 1 unit | 8,400,000 |
| **4** | **02** | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor diadakan | **Mamuju** | 8 unit |  **45,000,000**  | PAD |  | 8 unit | 10,000,000 |
| **4** | **02** | 01 | 2,07 | 11 | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor bangunan lain yang diadakan  | **Mamuju** | 3 unit |  | PAD |  | 3 unit | 10,000,000 |
| **4** | **02** | 01 | 2,07 |  | Pengadaan aset tak berwujud | Jumlah Aset tak berwujud lainnya yang diadakan | **Mamuju** | jenis |  |  |  | jenis |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,07 |  | Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor/bangunan lain yang tersedia | **Mamuju** | jenis |  |  |  | jenis |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,08 |  | **Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah** | ***Persentase Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran*** | **Mamuju** | 100 persen | 637.502.437 |  |  | 100 persen | **803,807,320** |
| **4** | **02** | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa surat menyurat  | jumlah laporan penyediaan jasa surat manyurat | **Mamuju** | 1 lap |  | PAD |  | 1 lap |  |
| **4** | **02** | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | **Mamuju** | 3 lap | 443.475.737 | DAU |  | 3 lap | 591,407,320  |
| **4** | **02** | 01 | 2,08 | 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor | **Mamuju** | 8 lap | 103.538.700 | PAD |   | 8 lap |  120,000,000  |
| **4** | **02** | **01** | **2,09** | **04** | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | **Mamuju** | 20 lap | 90.488.000 | **DBH** |  | 20 lap | 92,400,000 |
| **4** | **02** | 01 | 2,09 |  | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | ***Persentase barang milik daerah yang dipelihara*** | **Mamuju** | 100 persen | 862.226.050 |  |   | 100 persen | **244,985,750** |
| **4** | **02** | 01 | 2,09 | 01 |  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan roda 2 dan 4 yang dipelihara | Mamuju | 6 unit | 142.950.050 | DBH |   | 6 unit | 180,085,750 |
| **4** | **02** | 01 | 2,09 | 02 |  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan roda 2 dan 4 yang dipelihara | **Mamuju** | 26 unit | 16.600.000 | DBH |  | 26 unit | 39,100,000 |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar |  | **Mamuju** | **unit** |  |  |  | **unit** |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor |  | **Mamuju** | **unit** |  |  |  | **unit** |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan mebel | Jumlah Mebel yang dipelihara | **Mamuju** | **unit** |  |  |  | **unit** |  |
| **4** | **02** | **01** | 2,09 | 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Mamuju | 56 unit | . 26.448.000 | **PAD** |  | 56 unit | 9,800,000 |
| **4** | **02** | **01** | 2,09 | 08 | Pemeliharaan aset tetap lainnya | Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara | Mamuju | jenis |  |  |  | jenis |  |  |
| **4** | **02** | **01** | 2,01 | 09 | Pemeliharaan aset tak berwujud | Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara | Mamuju | 4 unit |  **6,000,000**  | PAD |  | 4 unit | 6,000,000 |
| **4** | **02** | **01** | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor / Bangunan Lainnya terpelihara | Mamuju | 4 unit |  | PAD |   | 4 unit |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang dipelihara | Mamuju | 3 unit |  |  |   | 3 unit |  |
| **4** | **02** | **01** | 2,09 | 11 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantorAtau bangunan lainnya | Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan Musrenbang | Mamuju | 3 unit | 670.228.000 | PAD |   | 3 jenis | 10,000,000 |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan/rehabilitasi tanah | Jumlah luas tanah yang direhab | Mamuju | M3 |  |  |   | M3 |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,15 |  | Layanan keuangan dan kesejatraan DPRD  | ***Hasil Penilaian DPRD terhadap layanan keuangan dan Kesejahteraan*** | Mamuju | memuaskan |  **14,306,875,774**  |  |   | memuaskan | **13,898.225,774** |
| **4** | **02** | 02 | 2,15 | 01 | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Jumlah layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Mamuju | 30 org |  **14,023,030,774**  | DAU |   | 30 org | 13,898,225,774 |
| **4** | **02** | 02 | 2,15 | 02 | Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan | Mamuju | 3 paket | 283.845.000 | DBH |   | 3 paket | 181,440,000 |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan medical check up | Jumlah Laporan Medical Check Up DPRD | Mamuju | kali |  |  |  | kali |  |
| **4** | **02** | **02** | **2,16** |  | Layanan Administrasi DPRD  | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi yang Dilaksanakan  | Mamuju | memuaskan |  **2,342,483,040**  | PAD |   | memuaskan | **2,227,719,600** |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD | Jumlah Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD yang diselenggarakan | Mamuju | dok |  |  |   | dok |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,16 | 02 | Fasilitas praksi DPRD | Jumlah Fraksi DPRD yang mendapatkan Fasilitasi | Mamuju | **6 praksi** | 0 |  DAU  |   | **6 praksi** | 109,077,600 |
| **4** | **02** | 02 | 2,16 | 03 | Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD | jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang terfasilitasi | Mamuju | 1 lap |  **200,704,000**  | DBH |   | 1 lap | 252.474.000 |
| **4** | **02** | 02 | 2,16 | 04 | Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD | Jumlah jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Kantor DPRD dan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | Mamuju | 7 paket |  **2,141,779,040**  |  DAU  |   | 7 paket |  1,866,168,000 |
| **4** | **02** | 02 |   |   |  **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Persentase capaian dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** | Mamuju | **100 Persen** |  **7,862,611,200**  |  |   | 100 Persen | **6,262,513,800** |
| **4** | **02** | 02 | **2,01** |  |  ***Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*** | ***Persentase peraturan dibentuk*** | **Mamuju** | **100 Persen** | 7.410.400 | **PAD** |  | **100 Persen** | **2,000,300** |
| **4** | **02** | 02 | 2,01 | 01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah usulan Ranperda yang diterima siap dibahas | Mamuju | 28 dok | 4.021.400 | PAD |   | 28 dok | 1,000,000 |
| **4** | **02** | 02 | 2,01 | 02 | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah ranperda yang dibahas | Mamuju | 28 dok | 3.389.000 | PAD |   | 28 dok | 1,000,300 |
| **4** | **02** | 02 | 2,01 | 03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah penyelanggaraan kajian perUU | Mamuju | 1 dok |  | PAD |   | 1 dok |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,01 | 04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah penjelasan/keterangan NA yang disusun | Mamuju | 28 dok | 1,591,100 | PAD |   | 28 dok |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,01 | 05 | Penyusunan tata Tertib DPRD | Jumlah Tatib DPRD yang disusun | Mamuju | dok | 2,998,400  | PAD |   | dok |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,01 |  | ***Pembahasan Kebijakan Anggaran*** | ***Persentase laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran*** | Mamuju | **100 Persen** | 5.952.000 |  DBH |   | **100 Persen** | 5,290,000 |
| **4** | **02** | 02 | **2,02** | **01** | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS | **Mamuju** | **1 dok** |  **1,568,500**  |  DBH |  | **1 dok** | 1,058,000 |
| **4** | **02** | 02 | 2,02 |  | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Mamuju | 2 Dok |  **1,034,000**  |  DBH |   | 2 Dok | 1,058,000 |
| **4** | **02** | 02 | 2,02 | 03 | Pembahasan APBD  | Jumlah Laporan Pembahasan APBD | Mamuju | 1 dok | 634.000 |  DBH |   | 1 dok | 1,058,000 |
| **4** | **02** | 02 | 2,02 | 04 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan | Mamuju | 1 dok | 1.323.000 |  DBH |   | 1 dok | 1,058,000 |
| **4** | **02** | 02 | **2,02** |  | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Laporan Pembahasan Laporan Semester | **Mamuju** | **2 dok** |  |  |  | **2 dok** |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,02 | 06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Mamuju | 1 dok |  **1,392,000**  |  DBH |   | 1 dok | 1,058,000 |
| **4** | **02** | 02 | 2,03 |  |  ***Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*** | ***Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*** | Mamuju | 100 persen | 1.687.400 | PAD |   | 100 persen | 2,000,000 |
| **4** | **02** | 02 | 2,03 |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Mamuju | 1 lap |  |  |   | 1 lap |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,03 |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Mamuju | 1 lap |  |  |   | 1 lap |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,03 |  |  Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Mamuju | 1 lap |  |  |   | 1 lap |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,03 |  |  Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Mamuju | 1 dok |  |  |   | 1 dok |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,03 | 05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Mamuju | 1 laP |  | PAD |   | 1 dok |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,03 | 06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Mamuju | 1 dok |  | PAD |   | 1 dok |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,03 | 07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Anggaran | Mamuju | 1 dok |  | PAD |   | 1 dok |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,03 | 08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Laporan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Mamuju | 1 dok | 1.687.400 | PAD |   | 1 dok | 2,000,000 |
| **4** | **02** | 02 | 2,04 |  | ***Peningkatan Kapasitas DPRD*** | ***Persentase Peningkatan Kapasistas DPRD*** | Mamuju | 100 persen | 2.947.163.000 |  |   | 100 persen | 1,243,117,550 |
| **4** | **02** | 02 | 2,04 | 01 | Orientasi DPRD | Jumlah laporan tata tertib | Mamuju | 30 org |  |  DAU  |   | 30 org |  |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,04 | 02 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah pelaksanaan pendalaman tugas DPRD dilakukan | Mamuju | 2 dok |  **1,056,504,800**  |  DAU  |   | 2 dok | 358,156,350 |
| **4** | **02** | 02 | 2,04 | 04 |  Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia | Mamuju | 10 org |  **270,000,000**  | PAD |   | 10 org | 270,000,000 |
| **4** | **02** | 02 | 2,04 | 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | jumlah tenaga ahli yang tersedia | Mamuju | 6 org |  **144,000,000**  | PAD |   | 6 org | 144,000,000 |
| **4** | **02** | 02 | 2,04 | 05 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah laporan kehumasan yang terselenggara | Mamuju | 1 dok | . 1.104.066.000 |  |   | 1 dok | 450,156,000 |
| **4** | **02** | 02 | 2,04 | 07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah laporan program kerja DPRD yang disusun | Mamuju | 1 dok | 228.000 |  DAU  |   | 1 dok | 1,000,400 |
| **4** | **02** | 02 | 2,04 | 08 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi dewan | Mamuju | 12 dok |  **382,366,200**  |  DBH |   | 12 dok | 19,804,800 |
| **4** | **02** | 02 | 2,05 |  | ***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*** | ***Persentase Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat*** | Mamuju | 100 persen | 3.734.170.300 |  |   | 100 persen | 3,238,055,200 |
| **4** | **02** | 02 | 2,05 | 01 |  Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah laporan kunjungan kerja dalam daerah | Mamuju | 540 lap | 90.856.100 | PAD |   | 540 lap | 163,155,400  |
| **4** | **02** | 02 | 2,05 | 02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah laporan Pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun | Mamuju | 30 dok | 960.200 | PAD |   | 30 dok | 2,587,800 |
| **4** | **02** | 02 | 2,05 | 03 | Pelaksanaan Reses | Jumlah Pelaksanaan Reses | Mamuju | 3 dok | 3.642.354.000 | DAU |   | 3 dok | 3,072,312,000 |
| **4** | **02** | 02 | 2,05 |  |  ***Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*** | ***Persentase Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD*** | Mamuju | 100 persen | 3.112.000 | PAD |   | 100 persen | 2,000,400 |
| **4** | **02** | 02 | 2,06 | 01 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Dokumen kode etik yang disusun | Mamuju | 1 dok | 3.112.000  | PAD |   | 1 dok | 2,000,400 |
| **4** | **02** | 02 | 2,06 | 02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah laporan pengawasan kode etik yang disusun | Mamuju | 1 lap | 1,571,400 | PAD |   | 1 lap |  |
|  | **02** | 02 |  |  |  ***Pembahasan Kerja Sama Daerah*** | ***Persentase laporan pembahasan kerjasama daerah*** | Mamuju | 100 persen |  |  |   | 100 persen |  |
|  | **02** | 02 | 2,08 |  |  Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | jumlah laporan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Mamuju | dok |  |  |   | dok |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,08 |  | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah laporan bahan komunikasi dan publikasi yang disusun | Mamuju | dok |  |  |   | dok |  |
| **4** | **02** | 02 | 2,08 |  | ***Fasilitasi Tugas DPRD*** | ***Persentase Fasilitasi Tugas DPRD*** | Mamuju | 100 persen | 1.153.114.100 |  DAU  |   | 100 persen | 1,770,050,350 |
| **4** | **02** | 02 | 2,08 | 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD | Mamuju | 129 dok | 1.151.419.100 |  DAU  |   | 129 dok | 1,464,463,000 |
| **4** | **02** | 02 | 2,08 | 02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah laporan kinerja DPRD yang disusun | Mamuju | 1 lap | 731.400 | PAD |   | 1 lap | 2,052,200  |
| **4** | **02** | 02 | 2,08 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah pelaksanaan tugas Bamus yang terfasilitasi | Mamuju | 12 dok | 963.600  | PAD |   | 12 dok | 2,000,800  |
| **4** | **02** | 02 | 2,08 | 04 |  Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah laporan tugas pimpinan yang terfasilitasi | Mamuju | 1 dok | - |  DAU |   | 1 dok | 52,470,000 |
| **4** | **02** | 02 | 2,08 | 05 |  Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus | Jumlah laporan pelaksanaan tugas panitia khusus yang terfasilitasi | Mamuju | 2 dok | - | DBH |   | 2 dok | 249,064,350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **BAB IV**

 **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja dan pendanaan Perubahan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappepan Kabupaten Mamuju untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

* 1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD kab. Mamuju tahun anggaran 2025 di sajikan dalam Tabel 4.1

Tabel. 4.1 (Tc.25)

| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja**  | **Target** | **Ket.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan setwan bagi pimpinan dan anggota DPRD (Tujuan) | Indeks kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | 90 % | 90 % |  |
| 2. | Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan berorientasi pelayanan prima. (sasaran strategis) | Indeks kinerja DPRD nilai akip Setwan  | 90 % | 90 % |  |
| 3. | Meningkatnya pelayanan bagi peningkatan kinerja DPRD Kab.Mamuju. (sasaran strategis) | Indeks kinerja DPRD hasil penilaian kualitas layanan setwan terhadap DPRD | BB | BB |  |

|  |
| --- |
|  |

Untuk mencapai target kinerja tersebut, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disajikan dalam Tabel TC. 33 pada bab sebelumnya. Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan perubahan pada Sekretariat DPRD kab. mamuju 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

* 1. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Kabupaten

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Mamuju , maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju tidak secara langsung mendukung Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Kabupaten dimaksud, Sekretariat DPRD berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

|  |
| --- |
|  |

Tabel 4.2

Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Kab. Mamuju Perubahan Tahun 2025

| No | Program/Kegiatan | Tahun 2025(PERUBAHAN) | Tahun 2026 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagu (Rp) | Pagu Indikatif (Rp) |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  **23,975,124,550**  | **22,506,627,773** |  |
| *1.* | *Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* |  **47,305,300**  | **32,121,000** |  |
| *2.* | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* |  **4,536,080,101**  | **4,473,456,503** |  |
| *3.* | *Administrasi Barang Miilik daerah pada Perangkat Daerah* |  **18,772,700**  | **2,402,500** |  |
| *4.* | *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* |  **5,048,700**  | **76.192.200** |  |
| *5.* | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* |  **1,030,598,448**  | **509,304,225** |  |
| *6.* | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* |  **188,232,000**  | **50,133,200** |  |
| *7.* | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* |  **637,502,437**  | **803,807,320** |  |
| *8.* | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* |  **862,226,050**  | **244,985,750** |  |
| 9. | Layanan keuangan dan kesejatraan DPRD |  **14,306,875,774**  | **13,898.225,774** |  |
|  | *Layanan Administrasi DPRD* |  **2,342,483,040**  | **2,227,719,600** |  |
| II | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |  **7,862,611,200**  | **6,262,513,800** |  |
| *1.* | *Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD* |  **7,410,400**  | **2,000,300** |  |
| 2. | Pembahasan kebijakan anggaran  |  **5,952,000**  | **5,290,000** |  |
| *3.* | *Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan*  |  **1,687,400**  | **2,000,000** |  |
| 4. | Peningkatan kapasitas DPRD |  **2,957,165,000**  | **1,243,117,550** |  |
| *5.* | *Penyerapan dan perhimpunan aspirasi masyarakat* |  **3,734,170,300**  | **3,238,055,200** |  |
| *6.* | *Pelaksanaan dan pengawasan kode Etik DPRD* | *3.583.000* | **2,000,400** |  |
| *7.* | *Fasilitasi Tugas DPRD* |  **1,153,114,100**  | **1,770,050,350** |  |
| **Total** |  **31,837,735,750**  | **28,769,141,573** |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**BAB V**

**PENUTUP**

**5.1 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah *(trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat DPRD. Selain sebagai bahan pelaksanaan perubahan kegiatan selama Tahun 2025, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Renja Sekretariat DPRD Merupakan Dokumen rencana kegiatan Sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan Perubahan selama tahun 2025. Renja ini menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan Sekretariat DPRD tahun 2025. Program-program dan kegiatan-kegiatan indkatif yang tercantum dalam rencana kerja Perubahan Tahun 2025 mengunakan biaya yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja daerah Kab. Mamuju, oleh karena itu komitmen pimpinan dan segenap staf Sekretariat DPRD Kab. Mamuju yang didukung oleh segenap aparatur daerah dan legislatif serta dukungan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan didalam mengimplementasikan rencana kerja ini.

Mamuju, 2025

Sekretaris DPRD Kabupaten Mamuju

**Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM**

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19651231 199303 1 181